

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH**



**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Bombana.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Bombana ini disampaikan terima kasih.

Rumbia, November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA



Drs. MAN ARFA, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660416 199203 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Landasan Hukum.....	5
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA TERADAP TAHUN SEBELUMNYA.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
3.3.Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam periode Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial Penerjemah dari Tujuan, Sasaran, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan programkegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, makasejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerjaharus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 6);
- l. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang menunjang Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bombana sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antarbagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan dmasing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penganggaran serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Bombana adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra						Realisasi Capaian 2022	Proyeksi		Analisis Catatan
				20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 22		20 22	20 23	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	0%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	91,29 %	100 %	100 %	
2	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Laporan	-	-		9%	10 %	11 %	13 %	15 %	11,5%	15 %	15 %	

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebagai Bagian dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan OPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

5. Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022 mendapat nilai BB dengan point 72,03. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Bombana untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang.
2. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Tata Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Bombana sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.
3. Belum maksimalnya kegiatan yang menyangkut peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Administrasi Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kuantitas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa, masih ditemukan Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan schedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi menyangkut pelaksanaan program pembangunan terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum.
3. Minimnya informasi dan pelatihan yang diikuti dalam rangka penetapan regulasi yang tepat terhadap hasil pelaksanaan dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh

Bagian Umum:

1. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akurat. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh OPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Belum seluruh OPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat OPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing OPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat OPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggung jawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antar perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional dan penataan birokrasi pemerintahan pada :

Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, dapat teridentifikasi antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang;
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
3. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggung jawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antar perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah

3.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bombana yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bombana.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Bombana juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Bombana. Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Bombana dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitas Harga BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melakukan monitoring terhadap harga bahanpokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembanganUMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomianmembentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan ModalDaerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoringdan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerjasehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasanperkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaandan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan diKabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi KegiatanPembangunan di Kabupaten Bombana Bersama Kepala Daerah/WakilKepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

- a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bombana adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu penguangkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Bombana. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	TARGET TAHUN 2023	CARA PERHITUNGAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	63,05 Poin	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Bombana telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72,3 Poin

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana adalah sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP


Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Bombana, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2023.

Rumbia, November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA



Drs. MAN ARFA, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660416 199203 1 012

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
2	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Persen	72,3	53.487.369.300	SEKRETARIS DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persen	100	33.981.419.300	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	dokumen/ laporan	4	150.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	53	9.315.589.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	8.263.689.000	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	971.900.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100%	12	300.000.000	BAGIAN UMUM
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	300.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	83	63.000.000	BAGIAN UMUM
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pasang	80	63.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	7.699.263.500	BAGIAN UMUM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.452.928.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	487.230.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	50.000.000	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	1.214.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4.495.105.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah yang diadakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	4.588.122.800	BAGIAN UMUM
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1.180.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	381.084.500	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	381.084.500	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	1	1.340.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1.178.230.000	BAGIAN UMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	572.930.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	605.300.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Persen	100	4.300.814.000	BAGIAN UMUM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	483.000.000	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	35.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.701.584.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	2.715.814.000	BAGIAN UMUM
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	400.000.000	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2.165.814.000	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitasi	Paket	1	2.684.186.000	BAGIAN UMUM
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	2.684.186.000	
Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Organisasi	Dokumen/ Laporan	7	280.000.000	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	3	50.000.000	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	40.000.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	60.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	80.000.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	706.400.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	706.400.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	17.494.450.000	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3	760.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN BAGIAN KERJASAMA
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	500.000.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	260.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	7	16.394.450.000	BAGIAN KESRA DAN KEMASYARA

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	3.044.450.000	KATAN
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	7.450.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Organisasi perempuan, Terselenggaranya Pekan Olahraga dan Seni Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Dokumen	1	5.900.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	Dokumen	11	340.000.000	BAGIAN HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun	Dokumen	3	60.000.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	240.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	3	40.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	2.011.500.000	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	dokumen/ laporan	14	449.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	295.000.000	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12	129.000.000	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	25.000.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	dokumen/laporan	17	172.500.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	50.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	70.000.000	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	52.500.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100%	1.240.000.000	BPBJ
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	600	596.003.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	600	569.890.000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50	74.107.000	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	3	150.000.000	BAGIAN SDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	50.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	50.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	50.000.000	